MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN MILITER
DAN PERADILAN TATA USAHA NEGARA
PENGADILAN TINGGI TATA USAHA NEGARA MATARAM
PENGADILAN TATA USAHA NEGARA KUPANG
JL. PALAPA No. 16 A OEBOBO ; Telp. : (0380) 821026 ; Fax. : (0380) 826576
Web : ptun-kupang.go.id ; E-mail : ptun.kupang@gmail.com
K U P A N G – NTT

NOTULA

Dasar : 1. Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 9 Tahun 2022;

2. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pengawasan Dan Pembinaan Atasan Langsung Di Lingkungan Mahkamah Agung Dan badan Peradilan Di Bawahnya;

Hari : Selasa

Tanggal : 31 Maret 2026

Pukul : 09:00 – 11:00

Tempat : Ruang Sidang Utama PTUN Kupang

Acara : Rapat Bulanan Periode Maret 2026

Peserta : Wakil Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang beserta segenap Hakim dan Pegawai Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang

Jalannya Kegiatan :

Kegiatan dibuka oleh Wakil Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang, kemudian dilanjutkan dengan pembahasan terhadap beberapa hal sebagai berikut:

A. Penyampaian dari Wakil Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang:

1. Kita semua harus memperhatikan dan menaati Maklumat Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 01/Maklumat/KMA/IX/2017 tentang Pengawasan dan Pembinaan Hakim, Aparatur Mahkamah Agung dan Badan Peradilan di Bawahnya, Perma No. 7 tahun 2016 tentang Penegakan Disiplin Kerja Hakim pada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang berada di Bawahnya, Perma No. 8 tahun 2016 tentang Pengawasan dan Pembinaan Atasan Langsung di Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan di Bawahnya, dan Perma No. 9 tahun 2016 tentang Pedoman Penanganan Pengaduan (*Whistleblowing System*) di Mahkamah Agung dan Badan Peradilan di Bawahnya, SE MenPAN RB No. 20 tahun 2021 tentang Implementasi Core Values dan Employer Branding Aparatur Sipil Negara yaitu "BerAKHLAK" (Berorientasi Pelayanan, Akuntabel, Kompeten, Harmonis, Loyal, Adaptif, Kolaboratif, serta mempedomani 8 Nilai Utama Mahkamah Agung dan motto PTUN Kupang yaitu "ITA ESA";
2. Berkaitan dengan Kegiatan *Public campaign*, Berbuka Bersama, dan berbagi takjil gratis yang telah terlaksana selama bulan maret 2026, pimpinan mengucapkan terima kasih karena kegiatan tersebut telah terlaksana dengan baik;
3. Berkaitan dengan libur daerah pada tanggal 2 dan 6 April 2026;
4. Berkaitan dengan kebersihan dan keamanan agar selalu diperhatikan, untuk kebersihan agar selalu menjadi tanggung jawab kita bersama karena kebersihan adalah komponen utama pada diri sendiri yang harus diperhatikan guna kinerja pegawai PTUN Kupang yang lebih baik;

B. Penyampaian dari Wakil Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang:

1. Berkaitan dengan laporan hawasbid kepaniteraan perkara:
   a. Berkaitan dengan keuangan perkara, terdapat transaksi berupa pembayaran biaya Pemeriksaan Setempat, penambahan panjar biaya perkara dan panggilan pihak ketiga yang berkepentingan, namun terhadap transaksi tersebut belum dicatat dalam Buku Induk Keuangan Perkara SIPP, Buku Hak-Hak Keuangan

Kepaniteraan/PNBP SIPP dan pada bagian detai biaya perkara di SIPP yaitu, Perkara 23/G/2025/PTUN.KPG, Perkara 32/G/2025/PTUN.KPG, Perkara 37/G/2025/PTUN.KPG, Perkara 43/G/2025/PTUN/KPG, Perkara 4/G/2026/PTUN.KPG, Adapun rekomendasinya Adalah agar dilakukan pencatatan pembayaran sesuai dengan tanggal transasksi yang terjadi dan tidak menunda dalam mencatat transaksi, agar selalu dilakukam koordinasi dengan pihak-pihak yang terlibat dalam setiap transaksi (Panitera Pengganti, Juru Sita, Kasir) agar tidak terjadi keterlambatan dalam pencatatan transaksi, terkait temuan tersebut belum terdapat tindak lanjut dari Kepaniteraan Muda Perkara;

2. Berkaitan dengan laporan hawasbid kepaniteraan hukum:
   a. Tidak dilakukan pengisian secara lengkap mengenai data pihak yang berperkara dalam buku register surat kuasa, berdasarkan hal tersebut Penitera Muda Hukum telah menindaklanjuti hal tersebut dengan berkoordinai dengan staff yang diperbantukan di bagian pencatatan register surat kuasa, terkait ketidaklengkapan pengisian data pihak pada kolom keterangan identitas pihak dan setelah data-datanya terkumpul, petugas telah melengkapi pencatatan identitas pihak yang dimaksud;

C. Laporan Hakim Pengawas Bidang
   1. Kepaniteraan Hukum:
      - Semua temuan sudah ditindaklanjuti.
   2. Kepaniteraan Perkara
      - Belum terdapat tindak lanjut.
   3. Sub Bagian Kepegawaian, Organisasi Dan Tata Laksana
      - Bahwa telah dilakukan pengawasan di bulan Februari 2026 terhadap bidang Subbag Kepegawaian, Organisasi dan Tata Laksana Pengadilan Tata Usaha Nagara Kupang lupa Menyimpan berkas tersebut dalam odner Kepegawaian Ibu Sudarti Kadir, S.H;

- Bahwa telah dilakukan pengawasan di bulan Februari 2026 Odner Kepegawaian Ibu Sudarti Kadir, S.H. yang dikirim ke PTUN Surabaya belum sesuia dengan yang seharusnya;
- Bahwa telah dilakukan pengawasan di bulan Februari 2026 terhadap bidang Subbag Kepegawaian, Organisasi dan Tata Laksana Pengadilan Tata Usaha Nagara Kupang agar lebih teliti lagi dalam memperhatikan odner- odner yang adaa pada Kepegawaian, Organisasi dan Tata Laksana Pengadilan Tata Usaha Nagara Kupang;
- Hasil Pengawasan Hawasbid pada Bulan Februari 2026 sudah dikirim sesuai dengan yang seharusnya diminta.

4. Sub Bagian Perencanaan, Informasi Teknologi, dan Pelaporan
   - Berdasarkan temuan oleh Hakim Pengawas Bidang, ditemukan bahwa Pada bagan struktur masih pimpinan yang lama, hal tersebut telah ditindak lanjuti;
5. Sub Bagian Umum dan Keuangan
   - Berdasarkan temuan pada bagian umum yaitu terdapat penggunaan Listrik kantor yang melebihi anggaran maksimal setiap bulannya, tindak lanjutnya bahwa telah terdapat penurunan dikarenakan pemakaian elektronik yang tidak perlu pada saat selesai jam kantor serta terdapat penurunan tagihan Listrik dari bulan Februari 2026 sebesar Rp 13.473.103,- menjadi Rp 9.898.988,- pada tagihan bulan Maret 2026;
   - Berkaitan dengan Penghapusan Barang Milik Negara, belum dilaksanakannya penghapusan barang milik negara terhadap barang yang kondisinya rusak parah, akinbatnya menumpuknya barang kantor dengan kondisi rusak parah pada Gudang 1 dan Gudang 2, kapasitas daya tamping Gudang yang semakin berkurang, terhambatnya pengadaan sarana dan prasarana baru untuk kebutuhan kantor, Adapun rekomendasi dilakukan inventarisir terhadap barang milik negara yang sudah tidak bermanfaat dan tidak efisien untuk dilakukan penghapusan barang milik negara, berkoordinasi dengan

pimpinan terkait pelaksanaan penghapusan BMN, serta membuat kelengkapan berkas administrasi penghapusan peralatan kantor/meubleair;

- Berkaitan dengan temuan berupa belum sesuainya ruangan ASI/Laktasi dengan ketentuan, rekomendasinya Adalah agar sebisa mungkin disediakan sarana dan prasarana sesuai dengan aturan medis;
- Berkaitan dengan bagian keuangan bahwa keseluruhan berkas GUP tertanggal 25 Februari 2026 Nomor SPM 00032A belum terdapat kwitansi pembayaran dan dokumen surat perintah membayar belum ditandatangani oleh bendahara serta penerima uang dan penerima barang, akibatnya syarat dokumen menjadi tidak lengkap, rekomenasinya agar dilakukan penandatanganan oleh pejabat pengelola keuangan terkait (bendahara) serta penerima uang dan penerima barang;

D. Laporan dari bagian kepaniteraan yang diwakili oleh Panitera Muda Perkara Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang:

1. Berkaitan dengan berkas perkara yang akan disusun oleh bagian Kepaniteraan Muda Perkara mohon dilengkapi seluruhnya. Jika ditemukan kekurangan pada berkas perkara, bagian Kepaniteraan Muda Perkara akan mengembalikan kepada Panitera Pengganti yang bersangkutan;
2. Berkaitan dengan laporan bulanan, mohon masing-masing bagian mengumpulkan seluruh laporan maksimal pada tanggal 1 April 2026, karena tanggal 2 – 5 April 2026 libur daerah dan cuti bersama Hari Paskah;
3. Berkaitan dengan KTP dan identitas para pihak mohon di *checklist* terlebih dahulu sebelum dilimpahkan kepada bagian Kepanitaraan Muda Perkara karena akan berdampak pada Upaya Hukum Banding;
4. Berkaitan dengan data para pihak, mohon setelah gugatan perbaikan dihapus di *e-court* oleh panitera pengganti karena akan berdampak pada Upaya Hukum Banding;

E. Laporan dari bagian kesekretariatan yang diwakili oleh Sekretaris Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang:

1. Berkaitan dengan DIPA 01 sebesar 66,28% telah tercapai untuk triwulan 1;
2. Berkaitan dengan DIPA 05 sebesar 1,80% telah tercapai pada triwulan 1;
3. Pembayaran Listrik mengalami penurunan yaitu sebesar Rp 9.898.988,-

F. Laporan Keuangan/Kas:

1. Untuk dana Taktis, sebesar **Rp. 2.525.000,-**
2. Untuk dana PTWP, saldo per tanggal 31 Maret 2026 sebesar **Rp. 10.145.000**,-
3. Untuk dana Bapor saldo per tanggal 31 Maret 2026 sebesar **Rp. 21.818.000**,-
4. Untuk dana DYK, saldo per tanggal 31 Maret 2026 sebesar **Rp. 3.259.500**,- ,lalu sumbangan bendahara sebesar **Rp 110.000,-**

G. Sesi Tanya – Jawab:

- Nihil

Kegiatan ditutup oleh Sekretaris Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang.

	Mengetahui,
Notulis,	Wakil Ketua Pengadilan
	Tata Usaha Negara Kupang,
I Putu Charles Wiarta Yasa, S.H.	Ardoyo Wardhana, S.H., M.H.
NIP. 20020516 202506 1 001	NIP. 19770918 200212 1 006